

LAPORAN PENELITIAN

STATUS HUKUM DAN AKIBAT PERKAWINAN SIRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Peneliti :

ALI AKBAR, M.Ag.



FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

LAPORAN PENELITIAN

**STATUS HUKUM DAN AKIBAT PERKAWINAN SIRI
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

Peneliti :

ALI AKBAR, M.Ag.



FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis sampaikan kepada Allah swt, karena atas izin-Nya laporan penelitian mandiri ini dapat diselesaikan. Penelitian ini berjudul "Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Atas rampungnya penelitian ini, penulis pantas menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, atas pokok-pokok pikiran, kritikan dan masukan yang berharga bagi penulis. Akhirnya, mudah-mudahan basil penelitian ini dapat bennanfaat bagi semua kalangan. Semoga Allah swt senantiasa. memberkati usaha baik yang dikerjakan oleh umatnya. *Amin ya rabbal'alamiin.*

MEDAN,30 April 2016
Penulis,

Ali Akbar,M.Ag

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk mengetahui status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. *Kedua*, untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), dengan pendekatan deskriptif. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, sepenuhnya mengandalkan sumber-sumber di perpustakaan. Pengumpulan data menggunakan teknik *cheklist* atau pencatatan dari dokumen-dokumen yang diteliti, berupa buku, majalah, maupun sumber teoritis lainnya. Analisis data menggunakan teknis deskriptif kualitatif, dan kesimpulan akhir menggunakan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama adalah sah, tetapi dalam hal berhubungan dengan pemerintah atau badan hukum publik lainnya diperlukan akta nikah.

Akibat hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatat atau tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama, maka anak-anak yang lahir dari hasil perkawinan itu hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sehingga yang dapat dituntut pemenuhannya adalah kewajiban ibu terhadap anaknya, tetapi tidak kewajiban ayah terhadap anaknya, dan dalam hal perkawinan tidak dicatat maka kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dikukuhkan secara yuridis. Hal ini disebabkan karena keberadaan perkawinan itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Terlebih-lebih lagi bila perkawinan itu putus. Tuntutan agar pihak laki-laki memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak dapat dipaksakan untuk dipenuhi, karena perkawinan itu sendiri dianggap tidak pernah ada.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Pengertian Perkawinan.....	10
B. Unsur-Unsur dan Syarat Perkawinan	13
C. Pencatatan Perkawinan	19
D. Akibat Hukum Perkawinan	26
E. Perkawinan Siri.....	30
F. Kerangka Konsep	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Jenis dan Sumber Data	34
C. Alat Pengumpulan Data.....	35
D. Analisis Data	35
E. Jadwal Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Status Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	37
B. Akibat Hukum Perkawinan Siri Menurut Undang- Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.....	51
1. Kedudukan Isteri dalam Perkawinan Siri.....	51
2. Kedudukan Anak	54
3. Dampak dari Putusnya Perkawinan yang Tidak Didaftarkan.....	59
4. Hak Suami Isteri atas Harta Benda.....	61
C. Pembahasan Penelitian	63

	Halaman
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat ditegakkan dan dibina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itu disebut keluarga. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah swt.

Dari sudut pandangan Islam, perkawinan adalah satu-satunya cara yang berguna untuk menjaga kebahagiaan umat dari kerusakan dan kemerosotan akhlak. Selain dari itu perkawinan juga dapat menjaga keselamatan individu dari pengaruh kerusakan masyarakat karena kecenderungan nafsu kepada jenis kelamin yang berbeda dapat dipenuhi melalui perkawinan yang sah dan hubungan yang halal. Justru itu Islam memberikan perhatian khusus kepada kaum muda mengenai masalah perkawinan, untuk menyelamatkan jiwa mereka dari perbuatan dan kerusakan akhlak seperti zina dan seumpamanya.¹

Dalam konteks hukum, jelas bahwa perkawinan adalah hukum Allah yang berlaku di alam nyata. Karenanya, Islam mengatur setiap aspek kehidupan berkeluarga, bermula dari memilih jodoh hingga kepada tanggungjawab suami dan isteri di dalam rumah tangga. Dalam Undang-

¹Iman Jauhari, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Keluarga Poligami*, Pustaka Bangsa, Jakarta, 2003, h.1.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan dalam Pasal 1 bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Masalah perkawinan di samping menjadi masalah pribadi bagi mereka yang melangsungkan perkawinan itu, juga menjadi ruang lingkup masalah keagamaan yang sangat sensitif dan erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. Sebagai salah satu masalah keagamaan, hampir di setiap negara di dunia mempunyai peraturan sendiri tentang perkawinan, sehingga pada prinsipnya diatur dan harus tunduk pada ketentuan-ketentuan ajaran agama yang melangsungkan perkawinan.

Menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan itu, agar suatu perkawinan dianggap sah, maka ia harus dilangsungkan berdasarkan agama serta harus didaftarkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang, sehingga perkawinan mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibuktikan atau peristiwa perkawinan itu telah

diakui oleh negara. Hal ini penting bagi anak yang lahir dari perkawinan serta harta yang ada dalam perkawinan itu.

Instansi yang melakukan pencatatan dinyatakan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu:

1. Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka yang beragama Islam.
2. Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang beragama selain agama Islam.

Walaupun pencatatan perkawinan bukan merupakan suatu syarat yang mutlak untuk sahnya perkawinan, tetapi merupakan suatu kewajiban bagi setiap pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan. Hal ini dapat dilihat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 sub (b) yang menyebutkan: “suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Berdasarkan itu pencatatan perkawinan maksudnya adalah agar suatu perkawinan yang dilangsungkan itu benar-benar merupakan suatu peristiwa yang dapat dibaca dalam surat-surat yang bersifat resmi. Surat resmi tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai alat bukti yang otentik terhadap pihak ketiga akibat adanya perkawinan yang telah dilangsungkan oleh kedua belah pihak sebagai suami isteri.

Dari ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa tujuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk mengatur tata tertib dalam perkawinan yang sah. Untuk dapat merealisasi maksud tersebut, Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberikan sanksi kepada barangsiapa yang melangsungkan perkawinan tanpa didaftarkan atau dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang sah, dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Sedangkan bagi pemuka agama yang melangsungkan perkawinan tersebut dapat dipidana, karena melanggar Pasal 530 KUH Pidana.

Walaupun peraturan perundang-undangan memberikan sanksi kepada kedua calon mempelai dan petugas agama yang melangsungkan perkawinan di luar prosedur Undang-Undang, namun dalam kenyataannya ketentuan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 530 KUH Pidana belum dapat mencegah pelaksanaan perkawinan di luar prosedur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya.

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam merupakan syarat dalam hidup kenegaraan saja. Abdurrahman dan Ridwan Syahrani menyebutkan “bilamana suatu perkawinan tidak dicatat sekalipun perkawinan tersebut sah menurut ajaran agama atau kepercayaan,

perkawinan tersebut tidak diakui oleh negara, begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan itu”.²

Suatu perkawinan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum atau peristiwa perkawinan itu telah diakui oleh negara apabila dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, sehingga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan itu diakui dan mendapat kepastian hukum baik oleh Undang-Undang maupun oleh negara. Dengan demikian pencatatan perkawinan bertujuan untuk ketertiban perkawinan dalam masyarakat.³ Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang masing-masing suami isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekcoakan diantara mereka atau salah satu tidak bertanggungjawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Berbeda dengan perkawinan siri atau yang dikenal dengan istilah kawin bawah tangan ataupun kawin rahasia, dilakukan berdasarkan

²Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996, h.15.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 107.

peraturan agama atau adat istiadat dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Berdasarkan perkembangan, kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan telah melakukan rukun dan syarat perkawinan, namun peristiwanya dirahasiakan pada publik.

Dalam khasanah hukum Islam, sistem hukum Indonesia juga tidak mengenal istilah kawin bawah tangan atau yang disebut dengan kawin siri dan tidak mengatur khusus perkawinan siri tersebut di dalam sebuah peraturan. Secara hukum maupun sosial, perkawinan siri merugikan pihak perempuan. Berdasarkan hukum negara, si perempuan tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak terhadap harta gono-gini jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Di tengah masyarakat berkembang pendapat bahwa masalah kawin siri adalah sah dilihat berdasarkan peraturan agama, karena masyarakat cenderung melihat persoalan agama secara tekstual saja. Masyarakat banyak yang tidak memahami status hukum dan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan siri tersebut. Sejatinya hukum agama harus dilihat secara kontekstual, Karena syariat Islam dibuat untuk memberi kemaslahatan kepada umatnya. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bermaksud

melakukan penelitian dengan mengajukan judul “Status Hukum dan Akibat Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

B. Perumusan Masalah

Masalah yang diajukan di dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana akibat hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis penelitian ini berguna dalam penambahan khasanah kepustakaan di bidang keperdataan, khususnya tentang perkawinan siri.

2. Dari segi praktis, penelitian ini sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi masyarakat untuk mengetahui perkawinan siri dan akibat hukumnya

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari lima bab, masing-masing memiliki beberapa subbab dan pasal sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan. Adapun yang menjadi subbab dalam pendahuluan ini adalah latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka, yang terdiri dari pengertian perkawinan, unsur-unsur dan syarat perkawinan, pencatatan perkawinan, akibat hukum perkawinan, perkawinan siri serta kerangka konsep.

Bab III adalah metode penelitian yang meliputi pembahasan, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, alat pengumpulan data, analisis data dan jadwal penelitian.

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari pembahasan status perkawinan siri menurut undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, akibat hukum perkawinan siri menurut undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 serta pembahasan penelitian.

Bab V adalah penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan ialah "suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim".¹ Menurut Mahmud Yunus, perkawinan adalah "akad antara calon suami dengan calon isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat".²

Dari pengertian di atas, perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu fenomena penataan fitrah yang tersimpan dalam diri manusia, sebagaimana tertera dalam Alquran surat *Yasin* ayat 36:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: "Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui".³

Dalam suatu hadis, Nabi saw bersabda: "Sayalah yang paling bertakwa kepada Tuhan, namun saya ini salat, tidur, puasa, berbuka, dan menikah,

¹Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Attahiriyyah, Jakarta, 1996, h. 355.

²Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hida Karya Agung, Jakarta, 1993, h. 1.

³Q.S. *Yasin*/36:36.

itulah sunnahku. Barangsiapa yang tidak mengikuti sunnahku bukanlah umatku”.⁴ Dari hadis ini, Rasulullah memperingatkan umatnya yang telah sanggup untuk menikah. Pernikahan/perkawinan merupakan salah satu sunnah Rasul terhadap umatnya.

Islam sebagai agama fitrah, yakni agama yang sesuai dengan naluri manusia, tidak melarang umatnya untuk menyalurkan nafsu biologis, sepanjang mereka mengikuti atau menjalankan keinginan itu berdasarkan jalan atau aturan yang telah ditentukan oleh agama. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah bagi manusia untuk memiliki keturunan, berkembang biak dan melastarikan hidupnya, setelah setiap pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, disebutkan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah saw bersabda: “Empat perkara yang merupakan sunnah para Nabi: celak, wangi-wangian, siwak dan kawin” (H.R. Thurmudzi, Imam Ahmad dan al-Baihaqi).⁷

Perkawinan yang dilakukan secara sah dan sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul, maka akan menghindarkan diri dari perbuatan zina

⁴Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, h. 13.

⁷Abduh Ghalib Ahmad 'Isa, *Tuntunan Perkawinan Menurut Islam*, Pustaka Amani, Jakarta, 1995, h. 13.

yang mencelakakan diri sendiri, bahkan merusak susunan atau tatanan kehidupan masyarakat dimana ia tinggal. Untuk itulah Allah swt dan Rasul-Nya mensyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan yang telah mampu untuk menikah. Nabi Muhammad saw bersabda:

Wahai golongan kaum pemuda, barangsiapa di antara kamu telah mampu kawin, maka hendaklah ia kawin, sebab perkawinan itu lebih cepat memejamkan mata, dan lebih menjaga kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu adalah obat baginya (H.R. Bukhari dan Muslim).

Melalui pernikahan, Allah menganugerahkan manusia penghidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitan serta memberikan kekuatan untuk mengatasi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat *An-Nur* ayat 33 yang berbunyi:

وَلَيْسَتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاثُوهُمْ مِنْ مَالِ
اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِيَبْتِغُوا
عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya

Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa (itu).⁸

B. Unsur-Unsur dan Syarat Perkawinan

Untuk melakukan perkawinan, maka harus dipenuhi unsur nikah sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum Islam yaitu:

1. Adanya calon mempelai laki-laki;
2. Adanya calon mempelai perempuan;
3. Ada wali nikah;
4. Ada dua orang saksi; dan
5. Terlaksana *ijab* dan *qabul*.

Pihak yang melakukan akad itu disyaratkan mempunyai sifat *ahliyyatul ada'* yang sempurna, yaitu telah dewasa, berakal sehat. Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah dewasa, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni Muslim dan akil baligh. Syarat-syarat bagi seorang wali adalah: (1) Islam, berarti orang yang tidak beragama Islam

⁸Q.S. *An-Nuur*/24:33.

tidak sah menjadi wali atau saksi; (2) Baligh (sudah berumur sedikitnya 15 tahun); (3) Merdeka; (4) Laki-laki dan (5) Adil.⁹

Wali nikah terdiri dari: (1) wali nasab, dan (2) wali hakim.

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai.
2. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang berhak menjadi wali adalah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
3. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya se ayah.
4. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat se ayah, mereka bersama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Jika wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

⁹Rasyid, *Fiqh*, h. 364.

Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, *adlal* atau enggan. “Dalam hal wali *adlal* atau enggan, maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut”.¹⁰

Selanjutnya saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang, dan yang dapat ditunjuk menjadi saksi adalah seorang laki-laki Muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli. Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah tersebut dilaksanakan.

Syarat atau rukun selanjutnya dari perkawinan adalah adanya *ijab* dan *qabul*. *Ijab* adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama sedangkan *qabul* adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama itu untuk diri yang mengucapkannya.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 yang menjadi syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah: (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai; dan (2) untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

¹⁰Ramulyo, *Hukum*, h. 75.

Suatu perkawinan yang akan dilangsungkan terlebih dahulu harus melihat calon suami atau isteri, apakah mereka bersedia untuk dikawinkan, dan harus dilihat apakah mereka telah pantas untuk kawin. Setelah melihat dan menyimpulkan bahwa mereka bersedia untuk dikawinkan dan telah pantas untuk kawin, barulah mereka bisa dikawinkan. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindarkan agar tidak terjadi suatu penyesalan di kemudian hari, baik dari kedua mempelai maupun dari kedua orang tua mereka sendiri.

Begitu juga dalam hal wali, sesuai ketentuan hukum *syara'* wali yang pantas juga harus diperhatikan. Hal ini perlu untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Ulama berbeda pendapat mengenai perkawinan yang tidak dilaksanakan dengan wali nikah. Imam Malik misalnya, berpendapat bahwa tidak ada nikah tanpa wali, dan wali menjadi syarat sahnya nikah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Zufar, Asy-Sya'bi dan Az-Zuhri berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedang calon suami sebanding (*kufu'*) maka nikahnya itu boleh. Perbedaan pendapat ini disebabkan tidak terdapatnya satu ayat atau hadis yang menjadi acuan lahirnya syarat wali dalam perkawinan.

Begitu juga halnya dalam hal saksi, seseorang yang akan menjadi saksi dalam perkawinan harus mempunyai syarat-syarat sebagai berikut: (1) laki-laki; (2) baligh; (3) waras akalnya; (4) dapat mendengar dan melihat; (5)

bebas, tidak dipaksa; (6) tidak sedang mengerjakan ihram haji; dan (7) memahami bahasa yang dipergunakan untuk *ijab qabul*.

Begitu juga dalam hal *ijab qabul*, dalam perkawinan penting untuk diperhatikan. Karena tanpa adanya *ijab qabul*, suatu perkawinan bisa dianggap tidak sah. Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami-isteri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*. Bila salah satu pihak ada yang gila atau masih kecil dan belum *tamyiz*, maka pernikahan itu tidak sah. *Ijab qabul* dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan *ijab qabul* tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain, atau menurut adat dianggap ada penyelingan yang menghalangi peristiwa *ijab qabul*. Tetapi dalam *ijab qabul* tidak ada syarat harus langsung. Bilamana majelisnya lama dan antara *ijab qabul* ada tenggang waktu, tetapi tanpa menghalangi upacara *ijab qabul* tersebut, maka tetap dianggap satu majelis. Sama dengan pendapat golongan Imam Hanafi dan Imam Hambali.

Dalam Kitab Mughni disebutkan: bila ada tenggang waktu antara *ijab qabul*, maka hukumnya tetap sah, selagi dalam satu majelis juga tidak diselingi sesuatu yang mengganggu. Karena dipandang satu majelis selama terjadinya upacara akad nikah, dengan alasan sama dengan penerimaan tunai bagi barang yang disyaratkan diterima tunai, sedang

bagi barang yang tidak disyaratkan tunai penerimaannya, barulah disana dibenarkan hak *khiyar* tetap jadi membeli atau membatalkan.¹¹

2. Hendaklah ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*, kecuali kalau lebih baik dari ucapan *ijab* itu sendiri yang menunjukkan pernyataan persetujuannya lebih tegas. Pihak-pihak yang melakukan *qabul* harus dapat mendengarkan pertanyaan masing-masing dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, sekalipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami, karena yang dipertimbangkan disini ialah maksud dari niat, bukan mengerti setiap kata-kata yang dinyatakan dalam *ijab qabul*.

Para ulama fikih mensyaratkan hendaknya ucapan yang dipergunakan dalam *ijab qabul* bersifat mutlak tidak "diembel-embeli" dengan sesuatu syarat, misalnya pengijab mengatakan "aku kawinkan putriku dengan kamu, lalu penerimanya menjawab: saya terima". Maka *ijab qabul* seperti ini namanya bersifat mutlak. *Ijab qabul* yang "diembel-embeli" dengan suatu syarat, atau untuk waktu tertentu atau dikaitkan dengan sesuatu syarat, maka dalam keadaan seperti ini akad nikahnya dianggap tidak sah.

C. Pencatatan Perkawinan

Untuk mengetahui tentang pencatatan perkawinan, dapat dilihat ketentuan yang diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

¹¹*Ibid*, h. 49.

1975. Sesuai dengan ketentuan bunyi Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan yang mengatur pencatatan perkawinan yaitu :

1. Bagi mereka yang beragama Islam dan melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk Pasal 2 ayat (1). Tentang hal ini diatur pada Bab II dan III, IV Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 17.
2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) bagi mereka mereka yang bukan beragama Islam dan yang melangsungkan perkawinan menurut kepercayaan agama mereka pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.
 - a. Bagi mereka yang beragama Kristen yang terdiri dari penduduk bumi putera di daerah Jawa-Madura dan Minahasa berlaku Reglement Pencatatan Sipil bagi bangsa Indonesia Kristen Jawa-Madura dan Minahasa (Stbl. 1933 No. 75; dirubah dengan Stbl. 1933 No. 327 jo. 338; Stbl. 1934 No. 621 dan 622; Stbl. 1936 No. 247 dan 607; Stbl. 1938 No. 246 dan 170 jo. No. 264; Stbl. 1939 No. 288; tentang pencatatan pernikahan ini diatur pada bagian keenam Pasal 48 sampai dengan Pasal 58).
 - b. Bagi golongan Tionghoa berlaku Reglement Pencatatan Sipil Tionghoa, yaitu Ordonantie tanggal 29 Mei 1917 Stbl.1917 No.130 mulai berlaku

tanggal 1 Mei 1919 Stbl. 1919 No. 81. Mengenai pencatatan pernikahan dalam reglement ini diatur pada bagian kelima mulai dari Pasal 67 sampai dengan Pasal 72.

- c. Bagi mereka yang termasuk golongan Eropa pencatatan pernikahan diatur dalam Reglement pencatatan sipil Eropah Stbl. 1849 No. 25 yang telah mengalami perubahan dan penambahan. Dalam reglement tersebut pencatatan perkawinan diatur dalam bagian ketiga dan keempat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 54 sampai dengan Pasal 64.

Jadi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, pegawai pencatat dan cara pencatatan perkawinan dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang disebutkan di atas. Tetapi sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan tidak mengurangi ketentuan khusus yang berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan seperti yang disebutkan di atas. "Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah".¹²

¹²M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co., Medan, 1995, h. 17.

Dengan demikian pencatatan perkawinan dilakukan:

1. Berdasar tata cara yang diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
2. Tata cara pencatatan yang diatur khusus dalam perundang-undangan yang berlaku bagi orang Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1955. Regelemen pencatatan sipil bagi mereka yang tidak beragama Islam sebagaimana yang diatur dalam Regelemen Pencatatan Sipil bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen Stbl. 1933 No. 327, Regelemen Pencatatan Sipil Tionghoa Stbl. 1919 No. 81 bagi mereka orang Tionghoa dan Stbl. 1849 No. 25 bagi mereka yang termasuk golongan Eropa.

Tatacara pencatatan yang diatur dalam perundang-undangan yang disebutkan di atas pada pokoknya hampir bersamaan dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Berdasarkan kompilasi Hukum Islan dalam Pasal 5 dijelaskan bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Tentang teknis pelaksanaannya dijelaskan dalam Pasal 6 kompilasi hukum Islam yang menyebutkan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.¹³

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan, dapat dipahami bahwa pencatatan tersebut adalah syarat administratif.¹⁴ Artinya, perkawinan tetap sah karena standar sah dan tidaknya perkawinan ditentukan oleh norma-norma agama dan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan perkawinan diatur karena tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum.¹⁵

Akibat yang timbul jika perkawinan tidak dicatat adalah jika salah satu pihak melalaikan kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum, karena tidak memiliki bukti-bukti yang sah dan otentik dari perkawinan yang dilangsungkannya. Tentu saja, keadaan demikian bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Bab II Pasal 2 ayat (1) menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yaitu pencatat perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam,

¹³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, h. 110.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 1954 Pasal 1 disebutkan:

- (1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.
- (2) Yang berhak melakukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanyalah pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

Selanjutnya di dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa Pegawai Pencatatan Nikah membuat catatan tentang segala nikah yang dilakukan di bawah pengawasannya, catatan yang dimaksudkan pada Pasal 1 dimasukkan ke dalam buku pendaftaran masing-masing yang sengaja diadakan untuk hal itu.

Pasal 3 ayat (1) menyebutkan, barangsiapa yang melakukan akad nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan yang dimaksudkan pada ayat (2) Pasal 1 dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp.50,-

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas terlihat bahwa sesuai bunyi Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, sanksi atau akibat hukum atas perbuatan tidak mencatatkan suatu perkawinan tidak membawa akibat batalnya (*vernietig*) suatu perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam, akibat hukum yang ada hanya sanksi denda sebesar Rp. 50,-. Jadi sahnya perkawinan menurut Islam tidak dihitung mulai pada tanggal hari pendaftaran dilakukan, tetapi pernikahan mulai pada tanggal hari dilakukan

akad nikah ijab kabul antara mempelai laki-laki dengan pihak wali mempelai perempuan.

Tentang bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 menurut Wirjono Prodjodikoro terdapat kekurangtegasan atas redaksinya, sebab redaksi ayat (1) tersebut hanya bersifat pengawasan oleh pegawai pencatat nikah.

Untuk kepastian hukum dalam pencatatan pernikahan orang Islam sebagaimana Pegawai Pencatatan itu tidak hanya bersifat mengawasi saja, tapi harus dengan tegas disebut dalam pasal tersebut agar setiap perkawinan harus dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Tetapi dalam prakteknya pada masa sekarang, perkawinan secara Islam tetap dilakukan di hadapan pegawai pencatatan nikah, dimana si pegawai itu datang sendiri ke tempat upacara akad nikah perkawinan.¹⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa manfaat dan fungsi pencatatan perkawinan itu tidak lain semata-mata untuk kepentingan administratif saja dan tidak ada hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Karena bagaimanapun sahnyanya suatu perkawinan adalah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sehingga proses pencatatan hanya merupakan tuntutan administrasi.

K. Wantjik Saleh menyebutkan:

Kiranya dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan itu berfungsi untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan masyarakat, karena dapat dibaca dalam suatu surat resmi dan termuat pula dalam suatu daftar yang dapat dipergunakan dimana perlu, terutama sebagai

¹⁶R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1992, h. 42.

suatu alat bukti tertulis yang autentik. Dengan adanya surat bukti itu dapatlah dibenarkan atau dicegah suatu perbuatan lain.¹⁷

Dengan demikian pencatatan perkawinan selain merupakan syarat administratif yang substansinya bertujuan untuk mewujudkan ketertiban hukum, ia mempunyai cakupan manfaat yang sangat besar bagi kepentingan dan kelangsungan suatu perkawinan.

D. Akibat Hukum Perkawinan

Pernikahan yang dilangsungkan dengan persyaratan dan dengan rukunnya yang sempurna menjadi sah berikutnya mempunyai akibat hukum yang mengikat berupa hak dan kewajiban baik yang ada pada suami saja, isteri saja maupun yang ada pada keduanya, dua pihak secara bersama.

Mengenai hak dan kewajiban yang ada pada kedua-duanya secara bersama adalah bebas bergaul, kerjasama dan bermusyawarah. Karena pernikahan sah mengakibatkan kedua belah pihak menjadi halal boleh bergaul yang meskipun diharamkan sebelum akad nikah itu dilangsungkan seperti bersenggama dan sebagainya.

Dalam Pasal 77 kompilasi hukum Islam ditentukan mengenai hak dan kedudukan suami bersama isteri, yaitu:

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

¹⁷K. Wantjik Saleh, *Uraian Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Ichtiar Baru, Jakarta, 1992, h. 16.

2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
4. Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.
5. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.¹⁸

Syariat Islam mengatur hak dan kedudukan suami bersama isteri yang seimbang. Hal ini tersimpul dan tercermin dari perkenaan syariat kepada kedua belah pihak untuk mengambil ketetapan melalui permusyawaratan di antara mereka.

Dengan demikian sebagai suatu perikatan, akad nikah menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban di antara kedua pihak yang berakad. Apa yang menjadi hak pihak pertama akan menjadi kewajiban pihak kedua dan sebaliknya. Jadi apa yang menjadi hak isteri semuanya adalah menjadi kewajiban suami. Nafkah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal menjadi hak isteri maka hal ini menjadi kewajiban suami.

Menurut Pasal 80 kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa:

1. Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangga, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.

¹⁸Achmad Kuzari, *Pembahasan Tentang Kompilasi Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, h. 170.

2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan mempelajari pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, *kiswah* (pakaian) dan tempat kediaman bagi isteri.
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak.

Selanjutnya yang menjadi kewajiban isteri adalah harus taat kepada suami. Menurut kompilasi hukum Islam Pasal 83 disebutkan bahwa kewajiban utama isteri adalah:

1. Berbakti lahir dan batin kepada suami dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, dengan dilangsungkan perkawinan maka timbullah akibat hukum perkawinan bagi suami dan isteri. Menurut Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan suami wajib melindungi isterinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Kebersamaan hidup dapat ditempuh dengan

melangsungkan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang akhirnya rumah tangga tersebut akan menjalin hubungan dengan masyarakat sekitarnya.

E. Perkawinan Siri

Kawin siri atau nikah siri sama dengan kawin bawah tangan ataupun kawin rahasia. Secara umum, kawin siri dilakukan berdasarkan peraturan agama atau adat istiadat dan tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah serta tidak dicatatkan ke Kantor Urusan Agama (KUA).

Menurut ketua Forum Umat Islam (FUI), KH. Athian Ali M. Da'i mengatakan kawin siri sama sekali tidak dikenal dalam Islam, justru yang disunahkan Rasulullah saw nikah itu tidak siri tapi dimaklumkan. Berdasarkan perkembangan, kawin siri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan melakukan rukun dan syarat perkawinan. Namun peristiwanya dirahasiakan pada publik. Kemudian setelah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diberlakukan, maka kawin siri menjadi perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syarat nikah, tapi tidak dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2).

Dalam khasanah hukum Islam, sistem hukum Indonesia juga tidak mengenal istilah kawin bawah tangan atau yang disebut dengan kawin siri dan tidak mengatur khusus perkawinan siri tersebut dalam sebuah peraturan. Bagi pihak perempuan perkawinan di bawah tangan berdampak merugikan secara hukum maupun sosial. Secara hukum negara, si isteri tidak dianggap sebagai isteri yang sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika

suaminya meninggal dunia, serta tidak berhak terhadap harta "gono-gini" jika terjadi perpisahan karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Sementara bagi pihak suami, dipastikan tidak berdampak sedikit pun yang mengawatirkan ataupun merugikan bagi diri laki-laki. Yang terjadi justru malah menguntungkannya.

F. Kerangka Konsep

Pada umumnya menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Perkawinan dilihat dari segi keagamaan merupakan suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Sudah menjadi kodrat alam sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan merupakan proses hubungan seksual manusia harus berjalan dengan semangat kedamaian dengan menghormati hak-hak asasi manusia sebagai insan-insan sederajat antara pria dan wanita, untuk menempuh kehidupan yang baik di dunia.

Pengertian perkawinan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, jika diperinci adalah:

1. Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri.
2. Ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta sejahtera.
3. Ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari rumusan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di atas, jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan kedua-duanya. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Ikatan lahir ini terjadi dengan adanya upacara perkawinan yakni pengucapan akad nikah bagi yang beragama Islam.

Sebagai ikatan batin, perkawinan merupakan pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Dalam taraf permulaan, ikatan batin ini diawali dan ditandai dengan adanya persetujuan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Selanjutnya dalam hidup bersama ikatan batin itu tercermin dari adanya kerukunan suami isteri yang bersangkutan. Terjadinya ikatan lahir batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Suatu perkawinan tidak hanya didasarkan pada ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi merupakan perwujudan ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir tercermin adanya akad nikah, sedangkan ikatan batin adanya perasaan saling mencintai dari kedua belah pihak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*). Pendekatan penelitian adalah deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan memaparkan fenomena perkawinan siri yang terjadi pada masyarakat pada umumnya. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yang menggunakan yuridis normatif ini dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkawinan.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini sepenuhnya mengandalkan sumber perpustakaan, sehingga penelitian ini disebut juga dengan penelitian perpustakaan (*library research*). Adapun data yang dikumpulkan berupa:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum berupa Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan masalah perkawinan siri.
2. Bahan hukum sekunder, yakni bahan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan penelitian.

3. Bahan hukum tertier yaitu seperti kamus hukum.

C. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *checklist* atau pencatatan dari dokumen-dokumen yang diteliti. Melalui sejumlah dokumentasi yang ada, dikumpulkan bahan-bahan penelitian baik berupa buku, majalah, maupun sumber teoritis lainnya sebagai dasar penyelesaian pokok masalah penelitian ini.

D. Analisis Data

Analisis data menggunakan teknis deskriptif kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis dari berbagai sumber yang diteliti dan dipelajari sebagai bagian yang utuh dengan tujuan memahami kebenaran.¹

Dalam menganalisis data berdasarkan pengkodean teks, akan dilakukan penghalusan konsep, melakukan komparasi dan kontras terhadap hal-hal yang ekstrim serta pemilahan kunci-kunci perbedaan yang muncul dalam setiap kategori atau item teks. Selanjutnya dilakukan integrasi terhadap semua temuan data dengan interpretasi peneliti. Kesimpulan akhir digunakan dengan metode berpikir induktif.

¹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2002, h. 250.

E. Jadwal Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Status Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Walaupun dalam perundang-undangan telah diatur secara rinci mengenai perkawinan, namun permasalahan perkawinan di luar ari perundang-undangan sering terjadi. Salah satu contoh yang berkembang di tengah masyarakat adalah masalah perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Perkawinan siri yang dilaksanakan sama seperti lazimnya perkawinan biasa, yang membedakannya hanya masalah administratifnya. Perkawinan siri tidak tercatat sehingga tidak memiliki bukti yang jelas dan otentik.

Perkawinan yang tidak tercatat pada akhirnya berdampak buruk, baik dalam praktek kehidupan masyarakat maupun dari segi hukum. Perkawinan yang tercatat akan jelas peristiwa hukumnya (*rechtsfeit*) serta sekaligus melindungi hak-hak individu dalam keluarga. Jika ditelusuri pasal-pasal dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta peraturan pelaksanaannya, perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan itu adalah sebagai suatu bentuk perkawinan yang menyimpang. Penyimpangan itu terjadi karena menurut sistem hukum perkawinan di Indonesia, tiap-tiap perkawinan itu harus dicatat dan didaftarkan.

hakim yang akan membuktikan ada tidaknya perkawinan dan hubungan antara suami isteri itu (*uiterlijk bezit van de huwelijke staat*).¹

Beberapa kasus perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan yang mencuat ke permukaan memperlihatkan bahwa persoalan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah persoalan yang serius dalam bidang penegakan hukum perkawinan di Indonesia. Di bawah ini diuraikan beberapa faktor-faktor penyebab kasus perkawinan siri.

1. Ketidaksesuaian kultur dan tidak mendapat restu orang tua. Faktor penyebab terjadinya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan itu dapat disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian kultur antara pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sehingga mendapat tantangan dari pihak orang tua.
2. Larangan poligami dan faktor psikologis. Adanya larangan untuk berpoligami dalam hukum perkawinan di Indonesia, menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan.
3. Kendala yuridis. Dalam kasus dimana calon mempelai wanita sudah berbadan dua atau hamil, untuk menikah secara resmi urusannya berbelit-belit, sehingga menjadi kendala yuridis dan kultural. Secara yuridis terdapat banyak kesulitan untuk melaksanakan perkawinan bagi muda-mudi yang belum memenuhi persyaratan umur untuk

¹R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1998, h. 59-60.

melangsungkan perkawinan, sehingga diambil jalan pintas melakukan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan.

Dengan demikian faktor hubungan psikologis, kondisi dalam keluarga, faktor tidak mendapat izin untuk melangsungkan perkawinan (kendala yuridis), menjadi alasan kuat hingga terjadi perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974, yaitu undang-undang perkawinan nasional yang telah disahkan dan dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1, berikut penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019, mengatur tentang dasar perkawinan, pencegahan perkawinan serta harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak perwalian dan ketentuan-ketentuan lain.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 1 Tahun 1974 di Indonesia, berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dari berbagai daerah yaitu:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku *ijab kabul* antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang-orang Bali yang dilaksanakan menurut hukum adat dan agama yang seringkali upacaranya dengan upacara agama Hindu Bali yang dianutnya.

3. Bagi orang-orang asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijk Ordonantie Christen Indonesia* (HOCI S. 1933 No. 74). Aturan ini sekarang sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata dengan sedikit perubahan. Aturan ini juga sudah tidak berlaku lagi sejauh sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lain yang sama, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
6. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa (Indo) dan yang disamakan dengan mereka berlaku KUH Perdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW), termasuk dalam golongan ini orang-orang Jepang atau orang-orang lain, yang menganut asas-asas hukum keluarga Belanda.²

Dengan lahirnya undang-undang No. 1 Tahun 1974, masalah perkawinan yang di semua lingkungan masyarakat ditempatkan sebagai urusan keluarga dan masyarakat, bukan semata-mata urusan pribadi yang hendak kawin, kerana perkawinan telah merupakan urusan negara, yaitu mengenai tata cara dan pendaftaran perkawinan serta proses putusnya perkawinan. Dengan lahirnya undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut, bukan berarti pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas sama sekali dari pengaruh hukum yang dianut oleh masyarakat, seperti hukum Islam dan hukum adat.

Ketentuan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak hanya merupakan permasalahan hukum dalam arti pembenturan hukum antara hukum agama

²Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2000, h. 5.

Islam dengan hukum negara. Bagi masyarakat, perkawinan itu dapat diselenggarakan dalam satu rangkaian upacara yang tidak terpisah-pisahkan. Dalam hukum agama, perkawinan itu merupakan perbuatan yang suci (sakramen), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta kerabat tetangga dengan baik sesuai dengan agama masing-masing.³

Berdasarkan penjelasan di atas, dengan adanya undang-undang perkawinan nasional, yaitu undang-undang No. 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan abadi bagi bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki oleh perundang-undangan nasional bukan saja merupakan perikatan perdata, tetapi juga merupakan ikatan keagamaan sekaligus menampung asas-asas perkawinan menurut hukum agama, yang menghendaki dalam suatu perkawinan sebagai perikatan yang bersifat religius, kekeluargaan dan perikatan kekerabatan.

Dalam kaitannya dengan perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, secara materil menurut pandangan hukum Islam tetap di pandang sah. Sebab pencatatan dan pendaftaran perkawinan bukanlah syarat mutlak (yang termasuk pada rukun nikah) dalam hukum Islam. Pencatatan pernikahan adalah semata-mata penerapan dari asas publisitas menurut

³*Ibid.*, h. 10.

konsep hukum perdata Eropa. Dalam hukum Islam, sahnya suatu perkawinan tidak tergantung pada syarat pendaftaran atau pencatatan tersebut.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, menganut asas publisitas, yang diadopsi dari konsep hukum perdata. Itu pula sebabnya meskipun perkawinan itu dipandang sah apabila dilaksanakan menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan tugas pencatatan itu antara lain:

1. Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan tata kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam, beserta penjelasannya. Petunjuk bagi pegawai pencatat nikah dan Pegawai Pencatat Pendaftaran Nikah Talak Dan Rujuk (P3NTR) dalam melaksanakan peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975.
2. Petunjuk pelaksanaan peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975, berupa Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. D/Ins/117/1975.
3. Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 1975, tentang contoh-contoh akta nikah, talak, cerai dan rujuk.
4. Petunjuk-petunjuk Mahkamah Agung mengenai pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
5. Pedoman pelaksanaan tentang Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

6. Petunjuk Ketua Mahkamah Agung mengenai penerapan undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Meskipun pencatatan perkawinan menurut hukum perkawinan Islam tidak merupakan syarat formal yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan, tetapi dalam hukum Islam ditentukan bahwa perkawinan itu harulah dilaksanakan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Itu berarti hukum Islam melarang perkawinan yang disembunyikan atau dirahasiakan.

Di samping persyaratan tersebut, Nabi Muhammad saw menganjurkan bahwa suatu pernikahan hendaknya disertai dengan *walimatul 'usry* (pesta), walaupun hanya dengan mengundang segelintir orang. Ini untuk mensyukuri pernikahan itu sambil menghindarkan kerahasiaannya. Sebab merahasiakan perkawinan menjadikannya mirip dengan perzinahan dan dapat menimbulkan kerancuan status pasangan suami isteri serta anak yang akan dilahirkan. Kerahasiaan juga dapat mengurangi penghormatan dan kesucian rumah tangga. Melalui penyebaran berita perkawinan sepasang suami isteri, maka masing-masing akan memperhatikan dan memelihara pasangan agar tidak terjerumus dalam hal-hal negatif, minimal di mata mereka yang telah mengetahui tentang perkawinan itu, karena masing-masing telah membawa nama pasangan. Memang “kerahasiaan terbatas” terhadap dua tiga

orang dapat ditolerir, selama tidak disyaratkan terhadap para saksi dan orang lain ikut menghadiri perkawinan itu, untuk ikut merahasiakannya.⁴

Dalam penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa:

Suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.⁵

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan suatu perkawinan hanya bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa itu benar-benar pernah terjadi, bukan untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Mengenai sahnya suatu perkawinan, dengan jelas ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dalam penjelasan umum undang-undang No. 1 Tahun 1974 dijumpai rangkaian kata-kata yang berbunyi, "...tiap-tiap perkawinan "harus" dicatat menurut peraturan...dan seterusnya". Apabila suatu perkawinan dilakukan menurut agama atau adat istiadat saja, tanpa mencatatkannya menurut

⁴Quraish Shihab, "Perkawinan Terselubung: Diantara Berbagai Pandangan", dalam <http://www.harian.republika.com>, Edisi 31 Desember 2003.

⁵K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1996, h. 12.

peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan itu secara materil dapat saja dipandang sah, namun secara formil keabsahannya tidak dapat dibuktikan, sebab pencatatan perkawinan itu dimaksudkan adalah untuk membuktikan tentang adanya suatu peristiwa perkawinan yang sah.

Dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dimuat ancaman pidana bagi mempelai dan pegawai pencatat yang melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan tentang pencatatan. Mempelai diancam dengan pidana dengan setinggi-tingginya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) apabila ia: (a) tidak melakukan pertimbangan untuk kawin, dan (b) perkawinan tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat.

Pegawai pencatat diancam dengan pidana kurungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.7.500,- apabila ia: (a) tidak melakukan penelitian; (b) tidak memberitahukan adanya halangan perkawinan; (c) tidak menyelenggarakan pengumuman; (d) tidak menandatangani pengumuman; (e) melaksanakan perkawinan sebelum hari kesepuluh dari pengumuman; (f) tidak menyiapkan dan menandatangani akta perkawinan; dan (g) tidak menyimpan helai pertama, tidak memberikan helai kedua kepada panitera pengadilan dan kutipan akta perkawinan kepada suami isteri.

Tentunya yang melakukan peradilan perkara pelanggaran tersebut dan menjatuhkan pidananya adalah pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, bukan pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, walaupun yang

melakukan pelanggaran itu beragama Islam.⁶ Jika diperhatikan lebih lanjut, sebenarnya pencatatan suatu perkawinan hanya bersifat administratif saja yang kelak berguna sebagai alat bukti adanya suatu perkawinan. Tentang pembuktian ini disebutkan dalam Pasal 100, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa suatu perkawinan tak dapat dibuktikan dengan cara lain, selain dengan akta perkawinan (ayat 1).⁷

Selanjutnya Wantjik Saleh berpendapat:

Suatu pencatatan itu tidaklah menentukan sahnya suatu perkawinan, tapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata bersifat administratif. Sedangkan soal sahnya perkawinan, undang-undang perkawinan dengan tegas menyatakan pada Pasal 2 ayat (1), bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaannya sudah sah, sedangkan pencatatan perkawinan merupakan penyempurnaan agar ada bukti yuridis bahwa perkawinan itu memang pernah terjadi.

Jika dipandang dari sisi lain, khusus mengenai perkawinan campuran atau perkawinan antar orang yang berbeda agama, maka Kantor Catatan Sipil memegang peranan istimewa, yaitu dapat melangsungkan perkawinan dengan adanya izin pengadilan. "Seperti halnya dengan pasangan Jamal

⁶*ibid.*, h. 21.

⁷*Ibid.*, h.16.

⁸*Ibid.*, h. 17.

Mirdad dan Lidya Kandau yang diberi izin oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil”.⁸

Keadaan ini mengundang berbagai reaksi dan tanggapan. Para tokoh agama Islam (MUI) menentang keras tindakan Kantor Catatan Sipil yang berani menikahkan lelaki Islam dengan wanita yang bukan Islam atau sebaliknya. Mereka berpendapat bahwa tindakan tersebut jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974. Lagi pula Keputusan Presiden No. 12 Tahun 1983 tegas-tegas menyebutkan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwewenang mencatat perkawinan orang-orang yang tidak beragama Islam.

Menanggapi hal ini, pihak Kantor Catatan Sipil ternyata mempunyai pertimbangan sendiri sehingga berani mengambil tindakan demikian, Kepala Kantor Catatan Sipil Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Soekarno mengemukakan:

Sampai saat ini, belum ada undang-undang yang mengatur perkawinan campuran antar agama. Prinsip kami sebenarnya tidak boleh melanggar undang-undang, tapi juga tidak boleh mengabaikan pelayanan kepada warga. Mereka yang akan kawin adalah warga negara juga.⁹

Ternyata pendapat Kepala Kantor Catatan Sipil tersebut didukung pula oleh Direktur Perdata Mahkamah Agung, Nyonya Nawangsih Soetradi yang mengatakan, “Pencatatan nikah melalui Kantor Catatan Sipil sudah sah

⁸Bagong Suyanto, "Nikah Dibawah Tangan", dalam <http://www.kompas.com>, Edisi 8 Agustus 2006.

⁹*Ibid.*

menurut hukum formal, perihal hukum agama tentu menjadi tanggungjawab masing-masing”.¹⁰

Faktor lain juga yang menyebabkan terjadi perkawinan di bawah tangan karena adanya bentuk-bentuk hubungan kemasyarakatan yang longgar dari ikatan agama, moral dan adat istiadat. Hubungan itu sering semata-mata bersifat bisnis. Akibatnya terjadi apa yang disebut dengan “kawin kontrak”, yakni perkawinan yang disepakati oleh kedua pihak untuk waktu tertentu. Di samping itu, akhir-akhir ini sering muncul perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan akibat adanya larangan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga terjadi perkawinan di bawah tangan bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan kedua tersebut.

Dengan demikian jelaslah bahwa perkawinan dalam Islam menempati keistimewaan. Bahkan dianjurkan bagi setiap laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan perkawinan. Sebagaimana firman Allah swt dalam Alqurah surah *Al-Hujarat* ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ

أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di

¹⁰*Ibid.*

sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.¹¹

B. Akibat Hukum Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Uraian berikut mengkaji tentang aspek hukum perkawinan siri yang tidak terdaftar (tidak dicatat) menyangkut beberapa persoalan, antara lain masalah kedudukan isteri dalam perkawinan siri, kedudukan anak, dampak dari putusnya perkawinan yang tidak didaftarkan serta hak suami isteri terhadap harta benda.

1. Kedudukan Isteri dalam Perkawinan Siri

Perkawinan merupakan pertemuan dua kepribadian yang berbeda. Umumnya di antara pasangan yang hendak kawin telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dan biasanya mereka sudah merasa memiliki kesamaan minat, pandangan, selera dan lain sebagainya. Namun begitu kompleksnya kepribadian manusia, baik yang dibawa sejak kanak-kanak, dari latar belakang kehidupan keluarga, perubahan-perubahan kepribadian yang terjadi ketika dalam perjalanan perkawinan itu sendiri dan mungkin pengaruh faktor eksternal yang dapat menggoyahkan kepribadian seseorang,

¹¹Q.S. *Al-Hujarat*/49:13.

maka dalam perjalanannya sering menjadi kendala bagi keharmonisan pasangan suami isteri tersebut.

a. Menurut Hukum Islam

Di kalangan umat Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian antara laki-laki dengan wali dari wanita di lain pihak, perjanjian tersebut terjadi dengan suatu *ijab* yang dilakukan oleh wali calon isteri yang diikat dengan *qabul* dari calon suami dengan dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang saksi.

b. Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1946

Bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

c. Tugas P3NTR

Mengawasi suatu perkawinan, pelangsungan perkawinan itu sendiri dilakukan oleh kedua pihak calon suami isteri. Pengawasan ini hanya untuk menjaga supaya pernikahan itu betul terjadi menurut syarat sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam.

d. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pencatatan itu bukan merupakan syarat mutlak bagi sahnya suatu perkawinan. Pencatatan hanya merupakan soal administrasi. Pencatatan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi orang lain dan bagi masyarakat luas.

Oleh karena peraturan peraturan perundang-undangan perkawinan itu di Indonesia membuka peluang untuk membolehkan perkawinan tidak didaftarkan (walaupun kecil kemungkinannya), maka sebagian orang tidak mendaftarkan perkawinan tersebut dengan alasan yang berbeda. Beberapa alasan yang sering dinyatakan sebagai berikut:

1. Pendaftaran dianggap tidak ada perlunya sebab perkawinan sudah sah secara hukum Islam.
2. Pendaftaran mengeluarkan biaya.
3. Adanya perkawinan yang berlatar belakang penyelewengan biasanya perkawinan kedua tanpa seiiizin isteri pertama.

Khusus mengenai isteri yang menikah di bawah tangan (tidak didaftarkan atau dicatat) menganggap bahwa menikah seperti itu adalah baik daripada hidup bersama tanpa nikah. Ini mungkin bisa memberikan ketenteraman batin bagi pihak wanita. Pernikahan yang tidak dicatat atau perkawinan siri itu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya. Akibat hukum yang harus ditanggung perempuan adalah ia tidak bisa mendapatkan

harta "gono gini" ketika bercerai atau harta warisan jika sang suami meninggal dunia. Belum lagi si anak yang tidak diakui negara karena tidak ada dokumen pernikahan yang sah antara ayah dan ibunya. Serta sanksi sosial yang harus ditanggung oleh si isteri.

Pencatatan/pendaftaran perkawinan tersebut baru dapat dirasakan kebutuhannya pada saat membutuhkan perlindungan hukum dari kesewenangan laki-laki (suami). Perempuan berada di posisi paling dirugikan dalam setiap pernikahan siri. Perempuan sering menanggung konsekuensi pernikahan yang tidak dicatat secara negara.

2. Kedudukan Anak

Ditinjau dari segi psikologis atau biologis setiap orang mempunyai seorang ayah dan seorang ibu, bila seorang anak mempunyai seorang ayah dan seorang ibu berdasarkan perkawinan yang sah, maka terdapat hak kekeluargaan dengan kedua orang tuanya. Dilihat berdasarkan ketentuan undang-undang, anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, sedangkan anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatur secara ringkas mengenai kedudukan anak, yaitu pasal 42-44. Pasal ini berkaitan dengan bab berikutnya mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara orang tua dan anak yang pengaturannya tertera pada pasal

45-49 dan juga mengenai perwalian serta untuk membuktikan asal-usul anak, yang pengaturannya diletakkan pada pasal 50-55.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 menyatakan seorang anak sah apabila ia lahir selama...dari sebuah perkawinan yang sah. Terhadap persoalan perkawinan yang tidak didaftarkan atau tidak dicatat, sepanjang perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing, maka anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut adalah anak yang sah yang mempunyai hubungan kepada ayah dan ibu yang melahirkannya, oleh karena itu pula ayah dan ibunya wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut walau tidak didaftarkan. Jadi pada prinsipnya kedudukan anak tersebut sama dengan kedudukan anak yang lahir dari suatu perkawinan yang perkawinan itu didaftarkan atau dicatatkan.

Hukum perkawinan Indonesia menentukan bahwa anak di luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya beserta keluarga ibunya. Seterusnya disebutkan bahwa anak itu kedudukannya akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengaturan lebih lanjut dapat didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Aturan tata tertib itu harus dikembangkan dalam masyarakat yang kemudian diimplementasikan melalui kekuasaan pemerintah.

Dalam suatu perkawinan tentu salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan keturunan, yakni anak-anak yang dilahirkan, oleh karena itu kedudukan anak serta bagaimana hubungan antara orang tua dan anaknya itu akan menempati kedudukan yang penting. Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga.¹¹

Keabsahan seorang anak perlu mendapat perhatian mengingat kehidupan anak di masa mendatang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum. Kewajiban orang tua untuk memelihara anak mulai sejak lahir sampai anak sanggup untuk mandiri atau kawin (cakap bertindak menurut hukum) untuk mendidik dan mengajar mereka dengan sebaik-baiknya walaupun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus. Sebagaimana diatur dalam pasal 45 undang-undang perkawinan:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksudkan dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.¹²

¹¹Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, Dian Rakyat, Jakarta, 1996, h. 103-104.

¹²*Ibid*, h. 104.

Dari ketentuan pasal di atas, batas umur dan kemandirian anak-anak adalah merupakan ukuran orang tua secara terus menerus memberikan perhatian dan tanggungjawab walaupun perkawinan mereka telah putus. Prinsip ini bersifat relatif karena kemampuan untuk berdiri sendiri bagi setiap orang berbeda-beda menurut situasi dan kondisinya. Bagi seseorang yang berumur 17 tahun atau di bawah 18 tahun mungkin sudah dapat berdiri sendiri daripada seseorang yang berumur 28 tahun belum, sehingga kewajiban terhadap pemeliharaan seorang anak tetap berlangsung.

Orang tua juga menguasai anaknya sampai umur 18 tahun atau belum pernah nikah. Kekuasaan itu meliputi mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Kekuasaan orang tua tersebut dapat dicabut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan alasan kalau orang tua tersebut melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali. Kewajiban orang tua terhadap anak tidak saja meliputi diri si anak, tetapi ia juga berkewajiban mengurus barang-barang si anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak dibolehkan orang tua untuk memindahkan atau menggadaikan barang-barang tetap yang menjadi milik anaknya, kecuali apabila kepentingan itu menghendaki.

Di samping kewajiban orang tua kepada anaknya, anak juga mempunyai kewajiban kepada orang tuanya sepanjang kemampuannya. Sebagai orang yang melahirkan dan membesarkannya maka sudah

merupakan kewajiban anak untuk menghormati orang tuanya dengan sebaik-baiknya, baik ia masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Setiap perintah orang tua hendaklah ditaati sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Allah, kesopanan dan moral yang hidup di dalam masyarakat. Apabila anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tuanya menurut kemampuannya, serta keluarganya dalam garis lurus ke atas, bila mereka memerlukan bantuannya.

Sama halnya dengan hak dan kewajiban suami isteri dalam perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan yang oleh hukum dipandang tidak pernah ada, maka terhadap kewajiban orang tua terhadap anak, juga tidak dapat dituntut pemenuhannya. Dalam hal suami mengingkari adanya perkawinan, maka isteri tidak dapat menuntut. Inilah resiko dari perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan. Akibatnya, hukum hanya memandang anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Dalam kerangka ini, yang dapat dituntut pemenuhannya adalah kewajiban ibu terhadap anaknya, tetapi tidak kewajiban ayah terhadap anaknya.

Selama perkawinan berlangsung, keberadaan suami isteri itu dimata hukum tetap dipandang tidak terikat dalam satu perkawinan, oleh karena itu akibat hukum terhadap kewajibannya untuk memelihara anak, juga tidak dapat dipenuhi secara yuridis, kecuali hanya berdasarkan fakta saja bahwa anak-anak yang dilahirkan adalah anak mereka. Namun sekali lagi, tetap saja

anak-anak tersebut tidak dapat dikatakan sebagai anak dari pasangan perkawinan itu, melainkan hanya anak ibunya saja.

3. Dampak dari Putusnya Perkawinan yang Tidak Didaftarkan

Perceraian terjadi karena adanya suatu ikatan perkawinan. Dengan perkataan lain bahwa perceraian itu mungkin timbul atau akan terjadi setelah adanya perkawinan antara seorang laki-laki sebagai suami dengan seorang perempuan sebagai isteri dalam membentuk suatu rumah tangga atau keluarga. Pada umumnya, kerabat dan masyarakat menginginkan agar suatu perkawinan yang telah dilangsungkan dapat bertahan untuk salama-lamanya. Tetapi ada kalanya perkawinan itu tidak dapat diteruskan karena timbulnya sebab-sebab atau alasan-alasan tertentu. Dengan perkataan lain perkawinan itu harus diputuskan berdasarkan sebab-sebab tertentu.

Sehubungan dengan putusnya suatu ikatan perkawinan, maka ada kalanya akibat dampak dari putusnya perkawinan itu sendiri dipengaruhi oleh sistem perkawinan yang dilangsungkan oleh pihak tersebut. Demikian pula kemungkinan adanya dampak atau putusnya perkawinan yang tidak didaftarkan.

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan suatu perkawinan sah jika dilangsungkan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan bagi calon suami dan isteri untuk

memproses pencatatan perkawinan kepada pegawai pencatatan perkawinan/nikah. Bagaimana jika perkawinan yang dilakukan tidak didaftarkan pada pegawai pencatat perkawinan?

Dalam hal ini akan sulit dibuktikan tentang adanya suatu perkawinan. Oleh karena itu prosedur pemutusan perkawinannya (perceraian) tidak perlu dilangsungkan di depan peradilan formal. Oleh karena negara memandang perkawinan itu tidak pernah ada. Bila dalam hal perkawinan itu putus, akibatnya terhadap harta dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu pengaturannya tunduk kepada aturan nonformal (dapat berupa kebiasaan atau aturan yang disepakati sendiri). Para pihak tidak dapat menuntut untuk diberlakukannya hukum formal. Tegasnya adalah, akibat dari perkawinan yang tidak tercatat itu kedua belah pihak tidak dapat saling menuntut berdasarkan hukum formal.

Dalam hal perkawinan yang dilangsungkan di bawah tangan, kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dikukuhkan secara yuridis. Hal ini disebabkan karena keberadaan perkawinan itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Terlebih-lebih lagi bila perkawinan itu putus. Tuntutan agar suami memenuhi kewajibannya sebagai suami, tidak dapat dipaksakan untuk dipenuhi oleh karena perkawinan itu sendiri dianggap tidak pernah ada.

4. Hak Suami Isteri Atas Harta Benda

Dalam hal penggunaan harta bersama, tidak ada syarat yang mutlak mengenai persetujuan kedua belah pihak, yang menjadi kelemahan dalam perkawinan siri. Di dalam undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pada pasal 36 dijelaskan:

1. Mengenai harta bersama, suami dan isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bersama masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹³

Dari bunyi pasal ini tampak bahwa harta benda itu terdiri dari:

1. Harta benda yang diperoleh dalam perkawinan disebut harta benda bersama.
2. Harta bawaan masing-masing pihak.

Ketentuan dari pasal 36 ayat (2) di atas apabila dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (2), terdapat perbedaan antara bawaan dan pusaka warisan yang diperoleh satu pihak dan harta yang diperoleh karena hibah. Maka dalam hal ini Yahya Harahap menafsirkan sebagai berikut:

1. Mengenai harta bawaan dan harta warisan yang diperoleh dalam perkawinan, terhadap kedua harta inilah yang dimaksudkan oleh ayat (2) Pasal 36, masing-masing berhak dan berkuasa penuh menurut hukum atas harta-harta tersebut.
2. Akan tetapi mengenai hibah dan hadiah atau atas jerih payah masing-masing termasuk pada kategori ayat (2) Pasal 35 ini yaitu berada di bawah pengawasannya tidak mutlak sepenuhnya seperti berlaku terhadap harta bawaan dan warisan. Jadi pengawasan ada

¹³*Ibid*, h. 102.

di tangan pihak-pihak, tapi bagaimana dan bermanfaatnya tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemiliknya.¹⁴

Kedudukan harta masing-masing pihak yang merupakan harta pribadi mereka yang diperoleh apakah dari pewarisan, hadiah atau hasil jerih payah mereka tetap berada di bawah pengawasan pihak masing-masing, karena harta pribadi dalam perkawinan terikat pada pemiliknya, sehingga tidak dapat dipisahkan darinya, tanpa persetujuan pemilik yang bersangkutan.

Syarat-syarat perkawinan dan akibat hukum dari perkawinan tersebut, sebenarnya mempunyai kaitan yang erat dengan pencatatan perkawinan. Di samping sebagai bukti tentang adanya perkawinan, pencatatan juga dimaksudkan sebagai langkah penertiban terhadap kemungkinan dilakukannya perkawinan yang menyimpang, lembaga yang mencatat ini di Indonesia adalah Kantor Catatan Sipil.

C. Pembahasan Penelitian

Orang yang telah menjalankan perkawinan telah melaksanakan Sunnah Rasul dan separuh dari ibadah di dunia telah diperoleh. Dengan berbagai keistimewaan tersebut, sehingga menempatkan hakiki perkawinan sebagai sesuatu yang agung. Namun dalam melangsungkan perkawinan banyak perbedaan pendapat dan ketidakjelasan bagi suatu masyarakat tentang pengertian:

¹⁴M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Zahir Trading Co., Medan, 1995, h. 130.

1. Perkawinan dari segi hukum agama
2. Perkawinan dari segi hukum negara
3. Perkawinan dari segi administrasi perkawinan itu sendiri

Aturan tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka agama. Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pegaulan masyarakat.

Jika kita melihat Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 maka sebenarnya dalam perkawinan sudah jelas. Bahwa hukum agama menjadi hukum yang berlaku secara nasional. Sehingga sebuah perkawinan dari sisi agama hanya sah atau tidak sah. Perkawinan disebut sah jika syarat dan rukun agamanya cukup. Artinya, dapat dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan hukum nasional yang berlaku hukum agama. Dan hukum yang berlaku tentang perkawinan itu disandarkan pada hukum perkawinan dari agama yang ada. Jadi, keabsahan perkawinan diukur menurut ketentuan hukum agama. Namun yang menjadi persoalan adalah masih adanya perkawinan di masyarakat yang tidak didaftarkan atau tidak dilakukannya pencatatan perkawinan sebagai suatu sistem administrasi pencatatan perkawinan.

Dengan kata lain problem yang timbul sekarang pernikahan secara hukum agama Islam belum seluruhnya diadministrasikan dengan baik.

Dari beberapa uraian di atas dapat dilihat bahwa mengenai perkawinan siri adalah sah dilakukan tanpa pencatatan atau pendaftaran dengan kata lain juga memberikan arti bahwa kedudukan seorang isteri dalam perkawinan yang tidak terdaftar/tidak tercatat adalah isteri sah dari suami yang menikahnya. Namun dalam ketentuan hukum pembuktian secara administrasi tersebut dipandang kurang dapat dijadikan sebagai kekuatan dalam pembelaan bagi pihak suami-isteri (khususnya isteri) jika suatu waktu terjadi pemutusan hubungan perkawinan (perceraian).

Jauh sebelum lahirnya Undang-undang perkawinan, hukum agama tentang perkawinan terutama hukum agama Islam di Indonesia sudah lama berlaku, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka dimantapkan dengan munculnya Undang-Undang No. 2 Tahun 1946 yang berisi tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk (PNTR).

Sebenarnya menikah tidak tercatat (di bawah tangan) sudah dikenal sejak lama, hanya pada masa itu segala macam pencatatan belum dilakukan dengan tertib. Tetapi jika masa sekarang masih terjadi perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun tidak tercatat pasti dengan latar belakang yang berbeda.

Menurut sejarah, Lembaga Catatan Sipil di Indonesia berasal dari Negeri Belanda. Sedangkan di Negeri Belanda sendiri Lembaga Catatan Sipil

ini berasal dari Negara Perancis yaitu masa Revolusi Perancis. Pendaftaran setiap kelahiran, perkawinan dan kematian dari penduduk sebelumnya telah ada dan dilaksanakan oleh para pendeta, kemudian pada tahun 1972 ditugaskan kepada Pemerintah Kota Praja untuk mengadakan daftar-daftar bagi setiap kelahiran, perkawinan dan kematian dan setiap warga Kota Praja/Penduduk. Lembaga Catatan Sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan Pemerintah Penjahan Belanda yang sejak Indonesia Merdeka belum pernah mengalami peninjauan kembali untuk dirubah atau disesuaikan dengan perkembangan hukum di dalam masyarakat. Peraturan perundangan mengenai catatan sipil pada zaman Hindia Belanda dulu sifatnya masih pluralistis dan membagi golongan Eropa, Indonesia asli, Timur Asing. Untuk golongan Timur Asing dibedakan lagi Timur Asing Cina dan bukan Cina. Pasal 163 jo Pasal 131 *Indische Staat Regeling* merupakan dasar hukum dari pada aneka ragamnya peraturan-peraturan catatan sipil yang berlaku di Indonesia.

Pasal 163 *Indische Staat Regeling*, berbunyi:

1. Apabila peraturan-peraturan dari Undang-undang ini, dari peraturan-peraturan umum dan peraturan lain. Regelement-reglement, peraturan polisi dan peraturan administrasi membeda-bedakan antara golongan Eropa, Indonesia dan Timur Asing, untuk mereka berlaku peraturan-peraturan yang berikut.
2. Pada peraturan-peraturan untuk golongan Eropa tunduk:

- a. Semua orang
 - b. Semua orang, tak termasuk dalam golongan No. 1 yang berasal dari Eropa
 - c. Semua orang Jepang dan selanjutnya semua orang, yang berasal dari lain tempat, tak termasuk dalam golongan No. 1 dan No. 2 untuk siapa di negerinya berlaku hukum keluarga, yang dalam pokoknya berdasarkan pada asas yang sama dengan asas-asas Belanda
 - d. Anak-anak yang sah atau yang diakui secara sah menurut Undang-undang, yang dilahirkan di Indonesia. Dan keturunan-keturunan lanjutan dari orang-orang yang dimaksudkan di bawah No. 2 dan No.3.
3. Pada peraturan-peraturan untuk golongan Indonesia tunduk kepada hukum adat dan hukum agamanya, kecuali kedudukan hukum dari golongan Indonesia Nasrani, yang ditetapkan berdasarkan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIK). Yang termasuk dalam golongan Indonesia asli di Indonesia tidak boleh masuk dalam suatu golongan penduduk lain dari golongan Indonesia asli, begitu juga mereka yang dahulu termasuk dalam suatu golongan penduduk lain dari golongan asli, dan sekarang telah mempersatukan diri dengan golongan Indonesia asli.
 4. Pada peraturan-peraturan untuk golongan Timur Asing tunduk kecuali kedudukan hukum mereka yang beragama Nasrani, yang akan ditetapkan dengan Ordonansi semua orang, yang tak termasuk golongan yang dimaksud oleh ayat (2) dan (3) dari pasal ini.

5. Gubernur Jenderal berhak, selaras dengan "*Raad Van Indonesie*" untuk menyatakan peraturan-peraturan yang berlaku bagi golongan Eropa juga berlaku bagi orang-orang untuk siapa sebetulnya peraturan-peraturan itu tidak berlaku. Pernyataan berlaku tersebut dengan sendirinya untuk anak-anak sah atau yang diakui menurut Undang-undang dan yang dilahirkan setelah itu serta turunan-turunan lanjutan dari yang bersangkutan.
6. Setiap orang dapat minta ditetapkan oleh hakim menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan dengan ordonansi dalam golongan penduduk mana ia termasuk.

Penyebutan penggolongan penduduk terdapat pula di dalam Pasal 131 IS. Untuk penduduk Indonesia asli di Jawa dan Madura masih ada pembatasan kepada beberapa golongan tertentu yaitu : Pasal 1 ayat (1) Stb. 1920 No. 751 jo. Stb. 1927 No. 564. Adapun maksud Lembaga Catatan Sipil adalah untuk mencatat/ mendaftarkan secara lengkap tentang setiap peristiwa penting dari seseorang, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian, termasuk pengakuan anak luar kawin. Pencatatan ini merupakan bukti otentik baik bagi orang yang bersangkutan maupun bagi orang lain/pihak ketiga yang berkepentingan.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur catatan sipil paca zaman Hindia Belanda yang hingga saat ini masih berlaku adalah :

1. Reglement catatan sipil untuk golongan Eropa dan mereka yang hukumnya dipersamakan dengan hukum yang berlaku bagi golongan

Eropa, diundangkan dengan publikasi tertanggal 10 Mei 1849 Stb. 1849 No. 25.

2. Reglement catatan sipil untuk beberapa golongan Cina, diatur di dalam Stb. 1917 No. 130 jo Stb. 1919 No. 81.
3. Reglement catatan sipil untuk beberapa golongan penduduk Indonesia (asli) di Jawa dan Madura di atur di dalam Stb. 1920 No. 751 jo Stb. 1927 No. 564.
4. Reglement catatan sipil untuk orang-orang Indonesia Nasrani di Jawa, Madura, Minahasa, Amboina Saparua dan Banda tanpa Pulau-pulau Teun, Nila dan Serua, diatur dalam Stb. 1933 No. 75 jo Stb 1936 No. 607.
5. Daftar-daftar catatan sipil untuk perkawinan campuran, diatur dalam Stb. 1904 No. 279.

Begitu pentingnya keberadaan lembaga pencatatan perkawinan itu menurut konsepsi hukum perdata Eropa, yang kemudian dengan asas konkordansi diterima pula dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan berbagai peraturan pelaksanaannya tetap memandang lembaga catatan sipil ini sebagai sebagai institusi yang menerbitkan akta tentang keabsahan suatu perkawinan.

Jika perkawinan itu tidak tercatat, maka undang-undang memandang perkawinan itu tidak pernah ada dan tidak membawa akibat hukum dalam hal perolehan harta benda dalam perkawinan. Itu berarti harta masing-

masing pihak tetap dikuasai oleh masing-masing pihak pula. Tidak terdapat percampuran harta dalam perkawinan.

Hal ini berlaku dalam keadaan baik sebelum melangsungkan perkawinan di bawah tangan maupun setelah perkawinan itu putus. Akibat hukum terhadap harta yang diperoleh dalam perkawinan, hanya ada jika perkawinan itu oleh undang-undang dipandang ada, namun jika terjadi keadaan sebaliknya, maka akibat hukum tersebut juga dipandang tidak pernah ada.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan atas hasil penelitian yang dikemukakan pada bagian terdahulu dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Status perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan tidak dicatat dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama adalah sah, tetapi dalam hal berhubungan dengan pemerintah atau badan hukum publik lainnya diperlukan akta nikah.
2. Akibat hukum perkawinan siri menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak dicatat atau didaftarkan di Kantor Urusan Agama, maka anak-anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja, sehingga yang dapat dituntut pemenuhannya adalah kewajiban ibu terhadap anaknya, tetapi tidak kewajiban ayah terhadap anaknya, dan dalam hal perkawinan tidak dicatat maka kedudukan suami sebagai kepala keluarga tidak dapat dikukuhkan secara yuridis. Hal ini disebabkan karena keberadaan perkawinan itu sendiri tidak dapat dibuktikan secara yuridis. Terlebih lagi bila perkawinan itu putus. Tuntutan agar suami memenuhi

kewajibannya sebagai suami, tidak dapat dipaksakan untuk dipenuhi oleh karena perkawinan itu sendiri dianggap tidak pernah ada.

B. Saran

1. Untuk mengurangi secara kuantitatif kasus-kasus perkawinan yang tidak didaftarkan di Kantor Urusan Agama sekaligus menciptakan kepastian hukum dan ketertiban dalam administrasi perkawinan, maka perlu diterapkan sanksi pidana yang tegas atas pelanggaran terhadap norma hukum perkawinan, khususnya dalam hal pencatatan perkawinan melalui institusi peradilan formal.
2. Kepada masyarakat perlu diberikan penyuluhan agar kesadaran hukum untuk mencatatkan setiap perkawinan melalui institusi formal yang ditetapkan pemerintah. Sehingga semakin meningkat kesadaran masyarakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang perkawinan.